

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG**

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ACCRUAL-BASED
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS IN THE
DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE OF SORONG
REGENCY***

¹Falerian Marsaulin Manalu, ²Erna Kurniawati, ³Markus Muda

^{1,2,3}Politeknik Saint Paul Sorong

¹falerian932@gmail.com, ²ernakurniawatih@gmail.com, ³markusmuda@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan dimana dalam penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong menggunakan basis akrual dan basis kas. Basis akrual yang digunakan dalam pelaporan keuangan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan, basis kas untuk pendapatan LRA dan belanja. Sistem teknologi informasi, sumber daya manusia cukup efektif, namun belum mencapai kata maksimal karena masih terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual yaitu rendahnya komitmen, kurangnya SDM yang berkompeten, kurangnya persiapan waktu dan kesalahan dalam menginput data dalam aplikasi.

Kata kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Akrual

Abstract

The purpose of this study aims to find out how the application of accrual-based government accounting standards at the Education and Culture Office of Sorong Regency. This type of research is qualitative research using descriptive analysis method. The results of this study show that the presentation of financial reports at the Sorong Regency Education and Culture Office is in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010. The presentation of financial reports at the Sorong Regency Education and Culture Office uses an accrual basis and a cash basis. The accrual basis used in financial reporting' for the recognition of LO-revenues, expenses, assets, liabilities and equity. Meanwhile, the cash basis for LRA income and spending. Information technology systems, human resources are quite effective, but have not reached their maximum because there are still several obstacles. The obstacles faced in implementing accrual-based SAP are low commitment, lack of competent human resources, lack of preparation time and errors in inputting data into the application.

Keywords: Implementation Of Government Accounting Standards, Accrual.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini, membawa kita untuk mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang baik demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif dan akuntabilitas sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang baik. Perwujudan (*good governance*) membutuhkan pergantian paradigma pemerintahan baru yang mendasar serta menuntut sesuatu sistem yang sanggup memberdayakan suatu daerah supaya sanggup berkompetensi secara regional, nasional maupun internasional.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang awal di Indonesia terbit pada tahun 2005, standar akuntansi pemerintahan yang diterbitkan tahun 2005 tersebut ialah standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. CTA tidak diketahui di negeri lain serta ialah basis transisi mengarah iakuntansi pemerintah berbasis akrual. Ada empat laporan keuangan yang dihasilkan dengan CTA, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penerapan akuntansi basis akrual dinegara-negara berkembang akhir-akhir ini mulai meningkat, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mulai mencanangkan penerapan akuntansi basis akrual sejak 2003. UU No. 17 tahun 2003 merupakan suatu bukti adanya ikeinginan pemerintah untuk perubahan metode akuntansi dalam sektor pemerintahan.

Dengan diterbitkan atau dikeluarkan peraturan nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah mengenai berbasis akrual maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan mempunyai landasan yang kuat sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan menjadi acuan dalam lingkungan pemerintahan.

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

2. DASAR TEORI/METODE PENELITIAN/PERANCANGAN

2.1. Definisi Akuntansi

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Abdul Halim (2007:43) mengemukakan akuntansi keuangan daerah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan serta pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan selaku informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah.

2.3. Pokok-pokok Penerapan SAP Berbasis Akrual

Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan SAP. Pokok-pokok penerapan SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang perlu diketahui untuk menyusun laporan

keuangan berbasis akuntansi akrual, sebagai berikut :

1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan
2. Peranan Laporan Keuangan

2.4. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun serta menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta Laporan Keuangan Pemerintah Wilayah (LKPD), dalam rangka transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, dan kenaikan mutu LKPP serta LKPD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.5. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bachtiar arif, Muchlis, Iskandar dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu :

1. Akuntabilitas
Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps. 23 ayat (5).
2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan membolehkan pemerintah buat melaksanakan perencanaan berupa penyusunan APBN serta strategi pembangunan lain, buat melaksanakan penerapan aktivitas pembangunan serta pengendalian atas aktivitas tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi dan ekonomis.
3. Pengawasan
Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

2.6. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis data kualitatif, Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran umum mengenai objek penelitian, yakni profil Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, serta data kualitatif lainnya yang dapat menunjang kecukupan informasi dalam penelitian ini.

2.7. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dalam pengumpulan data sebagai berikut : Observasi, Telaah dokumen dan Dokumentasi

2.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

2.9. Metode Analisis Data

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangannya

terdiri dari Tujuh (7) komponen yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan operasional
5. Laporan arus kas
6. Laporan perubahan ekuitas
7. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

3. PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong terletak di Jalan Klamono KM 24, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kode Pos 98414. Tugas pokok Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sorong yaitu membina dan mengurus kebutuhan belajar peserta didik mulai dari Pendidikan formal meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan juga Pendidikan NonFormal, seta Pembinaan Tenaga Kependidikan (PTK).

Fungsi utama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong msebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yaitu untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan, membina dan mengurus kurikulum, membina dan mengurus tenaga kependidikan, membina dan mengurus sarana dan prasarana sekolah terkhususnya untuk Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Melakukan kegiatan yang bersifat administratif, Merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terfokus kepada Guru, dan Memproses Ijin operasional.

3.2. Gambaran Umum penyajian laporan keuangan

Penyajian laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sorong mencakup transaksi pendapatan dan belanja daerah mengacu pada peraturan pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang akuntansi pemerintahan yang berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual bagi pemerintahan daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan Keuangan Daerah sistem prosedur yang digunakan mengacu Tentang kebijakan Akuntansi Dinas pendidikan dan kebudayaan dan peraturan Bupati Sorong Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong pasal 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Untuk melaksanakan peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sorong dengan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 terdiri dari tujuh komponen keungan terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong hanya menyajikan lima komoponen laporan keuangan yaitu Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun Penyajian laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya menggunakan lima komponen laporan Keuangan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong tidak menyajikan Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) hal ini didasari oleh peraturan laporan keuangan tersebut dipertanggung jawabkan oleh bendahara umum PEMDA/PEMROV.

3.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong menerapkan basis akrual dalam pembuatan Neraca, laporan operasional dan perubahan ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Dasar pengukuran yang diterapkan di Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Hasil Penelitian Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran – LRA

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai penyajian Laporan Realisasi anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi sekurang-kurangnya mengenai pendapatan-LRA, belanja-LRA, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong telah mengikuti peraturan-peraturan yang terkait kebijakan akuntansi yang dibuat oleh Entitas laporan yaitu pemerintahan provinsi Papua Barat Daya dan sudah sesuai dengan PP NO 71/2010.

2. Laporan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Pos-pos yang harus ada didalamnya adalah saldo anggaran awal, sisa lebih kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, serta koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Sedangkan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sorong tidak membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), karena yang membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah bendahara umum PEMDA/PEMROV atau BPKAD, hal ini diatur dalam PP No. 71/2010 Paragraf 15 dan 17 mengenai hal-hal yang dikecualikan dalam pelaporan keuangan.

3. Penyusunan Neraca

Penyusunan Neraca Dinas pendidikan dan kebudayaan menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (substance over form). Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.

4. Penyajian Laporan Operasional – LO

Laporan operasional Dinas pendidikan dan kebudayaan sudah menyusun laporan operasional sebagaimana mestinya. Perhitungan laporan operasional yang dilakukan Dinas pendidikan dan kebudayaan diperoleh dari hasil pendapatan-LO dikurangi dengan

Beban-LO sehingga mendapatkan surplus/defisit-LO dari kegiatan operasi, namun di Dinas pendidikan dan kebudayaan tidak terdapat beban non operasional maka tidak didapatkan hasil surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Periode penyajian laporan oprasioanal menurut PP No 71/2010 disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

5. Laporan Arus Kas – LAK

Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa laporan arus menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Setiap arus masuk dan keluarkas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas oprasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Sedangkan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak membuat Laporan Arus Kas karena, pada Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak adanya penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta penerimaan yang ada pada Laporan Arus Kas (LAK) karena penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan yang lain hanya diterima oleh PEMDA/PEMROV dan tidak ada pada Dinas pendidikan dan kebudayaan dalam penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta penerimaan yang ada pada Laporan Arus kas, hal ini dibenarkan dan didukung dalam PP No.71/2010 paragraf 15.

6. Laporan Perubahan Ekuitas – LPE

Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong telah menyajikan laporan Perubahan Ekuitas pos-pos sebagai berikut : pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dan ekuitas akhir, Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong dalam menyajikan laporan keuangannya pada item laporan perubahan ekuitas sudah. menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

7. Catatan atas laporan keuangan

Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong menyajikan informasi mengenai analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, dalam CaLK Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong juga menyajikan terkait informasi yang diharuskan dan dianjurkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan - pengungkapan lainnya yang diperlukan guna penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

3.4. Hambatan dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong mengalami kendala dari adanya kebijakan baru oleh pemerintah yaitu terkait proses sosialisasi dari BPKAD serta kurangnya persiapan sehingga waktu jatuh tempo yang singkat dan menambah beban kerja dalam pembuatan laporan keuangan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Begitupun dengan kualitas SDM Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong yang tidak mempunyai latar belakang akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam

pembuatan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu kendala lain yang dihadapi berupa masalah teknologi dalam pembuatan laporan keuangan, bendahara pengeluaran dalam menyusun laporan keuangan mengungkapkan Kesulitan mengelola dari data manual yang dibuat menggunakan Ms. Excel harus dipindah ke program SIPD, karena kurangnya pelatihan dalam menjalankan program tersebut sehingga mengalami keterlambatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Dukungan dan kerja sama semua pengelola keuangan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong telah melaksanakan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual. Penerapan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang menyajikan beberapa poin yang mencakup komponen-komponen berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pendataan mendetail atas Laporan Keuangan.
2. Hasil analisis laporan keuangan Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong hanya menyajikan lima komponen laporan keuangan dan tidak menyajikan laporan saldo anggaran lebih (SAL) dan laporan arus kas
3. Terdapat Kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual yaitu kurangnya SDM dalam penyusunan laporan keuangan sehingga mengalami keterlambatan waktu penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wibowo, H., & Lestari, Y. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(2), 89–104.
- [2] Bastian, I. (2020). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 45–58.
- [3] Fadilah, N., & Hidayat, R. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 12–25.
- [4] Kusuma, D. P., & Prasetyo, A. (2022). Analisis penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 67–81.
- [5] Sari, M., & Rahman, A. (2023). Evaluasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8(2), 133–148.
- [6] Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- [7] Johan. 2010. Telaah reformasi akuntansi pemerintahan (menuju basis akrual) dalam mewujudkan good governance. <http://johan.blogspot.com/2010/03/telaah-reformasi-akuntansi-pemerintahan.html>.

- [8] Papatungan. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Diperoleh pada 19 Februari 2023, dari : <http://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/140/>.
- [9] Putra, dkk. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.:<https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/207>
- [10] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Putri, w. 2017, " Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat". Diperoleh pada 20 Februari 2023, dari : <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/29353>.
- [12] Reydonnyzar, M., Dadang, S., & Basuki, R. (2020). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.